



Akan Digunakan Pemprov

Pemanfaatan Eks RSU Bangli untuk SKPD Terancam Batal

Bangli (Bali Post) -

Rencana pemerintah Kabupaten Bangli untuk memanfaatkan gedung eks Rumah Sakit Umum (RSU) Bangli yang bertempat di sebelah timur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali nampaknya harus tertunda. Pasalnya, baru-baru ini Pemerintah Provinsi Bali tiba-tiba melayangkan surat ke Pemda untuk memanfaatkan gedung tersebut.

Kepala Bagian Umum Setda Bangli I Made Mahindra Putra, Jumat (17/4) kemarin menjelaskan pemanfaatan gedung eks Rumah Sakit Umum Bangli ini sudah direncanakan sejak beberapa bulan lalu. Namun belum lama ini, Pemerintah Provinsi Bali tiba-tiba bersurat ke pemerintah daerah untuk memanfaatkan gedung tersebut sebagai Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba. "Untuk

pemungisian belum bisa kami lakukan, karena beberapa waktu lalu ada surat dari Pemprov, rencananya akan digunakan menjadi Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba," ujarnya.

"Karena kondisi tersebut pemerintah daerah belum bisa menentukan sikap terkait tindak lanjut rencana pemindahan beberapa SKPD ke gedung tersebut. Pihaknya harus melakukan

koordinasi dengan Pemprov terlebih dahulu dan menjelaskan keadaan beberapa SKPD yang memiliki masalah dalam hal fasilitas, salah satunya adalah bangunan yang kurang representatif. "Kami akan koordinasikan dulu dengan Pemprov terkait pemungisian bangunan ini," katanya.

Dikatakan bangunan ini merupakan milik pemerintah daerah, meskipun demikian,



Sambungan.

pihaknya tidak ingin berdebat dan memilih untuk tetap mengkomunikasikan hal ini dengan baik bersama pemprov.

Ditambahkan Mahindra Putra, jika pemanfaatan gedung ini dilakukan sekitar dua atau tiga tahun mendatang, Pemerintah Daerah mencoba untuk meminjam sementara, sampai batas waktu yang ada. "Kalau Pemprov memanfaatkan dua atau tiga tahun lagi, kami coba pinjam dulu," tambahnya. Sebelumnya, Pemkab melalui Dinas Tata Kota dan SKPD yang lain sempat melakukan aksi bersih-bersih dan pengosongan gedung ini.

Bahkan sudah mengeluarkan kajian terkait pembagian tempat SKPD yang akan menempati bangunan itu dengan tujuan agar masing-masing SKPD memiliki tanggung jawab.

Gedung tersebut direncanakan akan ditempati oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Perizinan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu, difungsikannya gedung ini juga sebagai langkah untuk mengurangi kesan rumah tak bertuan. Pasalnya, sejumlah warga sekitar sempat menganggap gedung ini angker. (kmb45)



Pilkada

Anggaran Panwaslu Hanya Disetujui Rp 1,5 Miliar

Bangli (Bali Post) -

Dalam rangka menghadapi Pilkada mendatang, Panwaslu terancam tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal. Pasalnya, hingga saat ini, Panwaslu masih terbentur anggaran. Dari Rp 4,8 miliar yang diajukan ke pemerintah daerah, yang disetujui hanya Rp 1,5 miliar. Hal itu menunjukkan Panwaslu masih kekurangan anggaran sebanyak Rp 3,3 miliar.

Menyikapi hal itu, Panwaslu akan berusaha mencari anggaran tambahan melalui APBD perubahan. Ketua Panwaslu Kadek Sandiarta, Jumat (17/4) kemarin menjelaskan, anggaran sebanyak Rp 4,8 miliar yang diajukan akan dipergunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan terkait

Pilkada, seperti sosialisasi dan membayar honorium pegawai.

Meskipun pengajuan anggaran pertama belum terpenuhi seluruhnya, Sandiarta mengatakan hal itu tidak akan mengganggu proses pengawasan. Disampaikan juga, beberapa waktu lalu pihaknya juga sudah melakukan audiensi bersama Bupati dan menyampaikan kekurangan anggaran ini bisa diajukan kembali pada APBD perubahan.

Minimnya anggaran yang ada saat ini, Panwaslu hanya bisa melakukan beberapa kegiatan. Untuk rincian kegiatan, pihaknya masih menunggu keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan pengarahannya dari Bawaslu. Dalam waktu dekat pihaknya akan merekrut Panitia Pengawas Lapangan yang direncanakan berjumlah 72 orang yang disesuaikan dengan jumlah desa yang ada. (kmb45)

Edisi : Sabtu, 18 April 2015

Hal : 18



Awasi Pilkada 2015 ✓

Panwaslu Dianggarkan Rp 5,4 Miliar

Amlapura (Bali Post) -

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Karangasem mengajukan anggaran Rp 5,4 miliar lebih untuk menghadapi perhelatan Pemilihan tahun 2015. Meski begitu, pihak Panwaslu belum bisa memastikan anggaran tersebut dapat memenuhi seluruh kebutuhan biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan Pilkada nanti. Peralnya, pihak Panwaslu saat ini masih menghitung kebutuhan pengawas sesuai dengan regulasi terbaru.

Ketua Panwaslu Karangasem, I Wayan Eka Suwecantara menjelaskan, pihaknya memang belum bisa memastikan kecukupan anggaran tersebut. Peralnya, saat ini pihaknya masih menghitung kebutuhan pengawas sesuai dengan regulasi yang baru. Dipastikan dalam 3-4 hari nanti baru bisa dipastikan kecukupan anggaran itu. "Sudah disetujui, total anggarannya sekitar Rp 5,4 miliar lebih. Masih kita hitung untuk kebutuhan pengawas sesuai regulasi yang baru," ujarnya.

Selain itu, dia menyampaikan, Panwaslu Karangasem yang berjumlah tiga orang hingga kini belum

memiliki sekretariat pasti. Selain itu, perekrutan jajaran Panwascam saat ini belum bisa dilakukan karena pihaknya harus menunggu PKPU tentang jadwal dan tahapan pilkada. Pihaknya juga harus menunggu kapan KPU Karangasem membantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). "Belum dilakukan perekrutan Panwascam karena masih menunggu saudara tua kami (KPU) kapan membentuk PPK dan PPS sesuai PKPU," imbuhnya.

Anggota Panwaslu pada Pilkada 2015 diisi wajah baru. Masing-masing I Ketut Suastama dan I Ketut Suberata. Sedangkan ketua panwaslu merupakan *incumbent* yang terpilih kembali. Di tempat terpisah Ketua KPU Karangasem, I Made Arnawa, mengaku pembentukan PPK dan PPS oleh KPU masih menunggu PKPU yang nantinya sebagai pedoman pelaksanaan Pilkada. Saat ini, pihaknya baru melakukan pembahasan anggaran tambahan sesuai dengan draf PKPU. "Masih menunggu kapan PKPU itu diturunkan, saat ini masih draf PKPU," ujarnya. (dwa)

Edisi : Sabtu, 18 April 2015

Hal : 12



Disnakanlut Gelar Vaksinasi Massal

Kuta Selatan dan Renon Zona Merah Rabies

Denpasar (Bali Post) -

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakanlut) Denpasar dan Badung, Jumat (17/4) kemarin menggelar vaksinasi massal dengan menyebar petugas ke masing-masing banjar, lalu masuk ke rumah-rumah warga. Sementara wilayah Kuta Selatan, Badung dan Renon, Denpasar, menjadi fokus vaksinasi massal ini karena kedua wilayah tersebut masuk zona merah rabies.

Menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan Disnakanlut Badung I Gde Asrama, Kuta Selatan masuk zona merah karena terindikasi banyak anjing liar, sehingga tingkat kerawannya sangat tinggi. "Iya betul, Kuta Selatan masuk zona merah. Makanya, untuk Kuta Selatan ada tim khusus yang melakukan vaksinasi di sana, terdiri dari tim Disnakanlut kabupaten dan provinsi," jelasnya.

Wilayah lainnya yang disasar adalah Kecamatan Kuta Utara, salah satu wilayah dengan populasi anjing paling banyak di Badung. Dengan pola *door to door* tersebut, diharapkan tidak ada anjing milik warga tidak memperoleh vaksinasi secara gratis dari pemerintah. "Langkah ini lebih efektif. Sebab, bila warga yang diminta berkumpul di banjar, khawatirnya warga enggan dengan bermacam alasan," katanya.

Dijelaskannya, populasi anjing di Badung diperkirakan mencapai 55.000 ekor, di mana terbanyak terdapat di Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal Petang, dan Kuta. Kendati populasi anjing berkisar 55.000, target vaksinasi hanya 50.000 ekor saja. Hal ini berkenaan dengan masalah anggaran,

sehingga sisanya atau yang 5.000 lagi akan diprogramkan pada APBD perubahan tahun 2015. "Satu ekor anjing itu anggaran vaksinasinya Rp 20.000, jadi tinggal dikalikan 50.000 ekor anjing, totalnya Rp 1 miliar," jelasnya.

Vaksinasi mengambil start di Desa Dalung. Tahun 2015, *sharing* anggaran dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat untuk program vaksinasi selama tiga bulan ke depan atau sampai bulan Juli, kurang lebih Rp 1 miliar. "Anggaran Rp 1 miliar itu juga *sharing*. Dari APBD Badung anggarannya untuk 30.000 ekor anjing, provinsi untuk 15.000 ekor anjing, dan APBN untuk 5.000 ekor anjing," katanya.

Program vaksinasi akan terus dilakukan dari April sampai Juli. Sasarannya adalah seluruh wilayah di Badung, seperti Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan.

Sementara itu, Disnakanlut Kota Denpasar akan menggelar vaksinasi rabies massal tahap ke-6 mulai 20 April hingga 9 Juni mendatang. Menurut rencana, vaksinasi massal diawali dengan menyasar Kelurahan Renon. Kepala Disnakanlut Denpasar A.A. Bayu Brahmastra, Jumat



Sambungan .



Bali Post/eka

VAKSIN - Salah seorang warga di Banjar Dukuh, Dalung, memegang anjingnya agar memudahkan petugas memberikan vaksin rabies, Jumat (17/4) kemarin. Selain di tempat tersebut, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung juga melakukan vaksinasi massal di beberapa wilayah Badung.

(17/4) kemarin mengungkapkan, vaksinasi rabies massal tersebut merupakan langkah antisipasi kasus rabies di wilayah Kota Denpasar. Kelurahan Renon menjadi sasaran pertama pada vaksinasi kali ini, lantaran Renon ditetapkan sebagai zona merah rabies pada 1 Maret lalu. "Ini sebagai upaya antisipasi rabies. Kita akan mulai dengan Kelurahan Renon, mengin-

gat sebelumnya daerah ini menjadi zona merah," katanya.

Kabid Kesehatan Hewan Disnakanlut Denpasar Luh Suri Uripini mengungkapkan, vaksinasi rabies tidak hanya menasar anjing saja, tetapi juga hewan peliharaan lainnya seperti kucing dan kerbau. Vaksinasi dilakukan secara *door to door* ke masing-masing rumah warga. Untuk itu, pihaknya

berharap masyarakat mempersiapkan hewan peliharaannya untuk dikunjungi tim vaksinasi rabies. (kmb27/kmb25)



Kapolda akan Evaluasi SP3 Kasus Adi Wiryatama

SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kasus Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dibahas saat acara ngopi bareng Kapolda Bali Irjen Pol. Ronny Sompie dengan pemred media cetak dan elektronik, Jumat (17/4) kemarin. Menurut Kapolda, pihaknya akan mengevaluasi dan mengoreksi penerbitan SP3 tersebut.

“Untuk SP3 ini, kami masih evaluasi secara substansial dan prosedural. Ketika muncul alat bukti baru, bisa jadi dasar untuk melihat SP3 itu, sejauh mana bisa dikoreksi lagi,” tegasnya.

Seperti pernah diberitakan, Adi Wiryatama bersama putranya, Gede Made Dedy Pratama, dan oknum notaris Ketut Nuridja, sempat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan I Made Sarja. Lapornya atas du-

gaan pemalsuan akta autentik yaitu sertifikat tanah dan memberikan keterangan palsu ke Polda Bali dengan nomor LP/160/III/2014/Bali/Spkt. tanggal 11 Maret 2014. Sedangkan tanda bukti laporan nomor TBL/160/III/SPKT Polda Bali. Setelah menetapkan Adi Wiryatama cs. sebagai tersangka dan mengirim SPDP ke Kejati Bali, Polda Bali mengeluarkan SP3 pada 28 November 2014. Polda berdalih, kasus itu bukan tindak pidana karena tanda tangan Made Sarja identik di Akta Jual Beli (AJB).

Selain kasus Adi Wiryatama, pada kesempatan tersebut Kapolda Bali juga ditanya kelanjutan kasus dugaan korupsi pipanisasi yang menetapkan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg sebagai tersangka sejak 2011 lalu. Ronny langsung minta Wadir Reskrimsus Polda

Bali AKBP T. Widodo Rahino menjelaskan perkembangan kasus tersebut. Widodo mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan penyidikan sejak delapan bulan lalu dan saat ini sudah dikirim lima berkas tersangka ke kejaksaan. Bahkan, salah satu tersangka divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1,5 tahun di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Ditemui usai pertemuan, Widodo mengungkapkan, untuk berkas tersangka lainnya sudah diserahkan ke kejaksaan. Namun hingga saat ini, belum P-21 (lengkap). Ia menegaskan, status Geredeg hingga saat ini masih sebagai tersangka dan proses hukumnya masih menunggu hasil penyidikan lebih lanjut. “Kami masih proses, sambil menunggu hasil persidangan tersangka lain,” tegasnya. (rah)

Edisi : Sabtu, 18 April 2015

Hal : 3



Kasus di Badung dan Denpasar

Kajari Sebut Masih Puldata

KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar Imanuel Zebua angkat bicara soal kinerja anggotanya dari Tim Intelijen yang sudah menyambangi Puspem Badung dan Pemkot Denpasar. Khusus untuk di Pemkab Badung, Kajari mengatakan timnya belum melakukan pengeledahan. "Kemarin (Kamis - red) masih dilakukan puldata (pengumpulan data). Itu penugasan, untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan," katanya, Jumat (17/4) kemarin.

Dia mengatakan pihak kejaksaan masih melakukan penyelidikan. Salah satu metode yang dilakukan adalah wawancara. Adanya informasi penyimpangan tirtayatra khususnya ke India, pihak kejaksaan terus akan melakukan pengembangan. Pun saat ditanya soal sebendel data yang disita, pihaknya belum mau membeber data yang suah didapat, dengan dalih masih dipelajari.

Immanuel Zebua sangat menyayangkan tertutupnya pihak pemerintah daerah, dalam ini Pemkab Badung. Menurutnya, pihak kejaksaan mestinya dapat banyak informasi. Namun hingga saat ini, pihak pemerintah masih tertutup. "Masih tertutup sekali. Kita masih *dor to dor*. Di sini (Denpasar dan Badung) kok susah ya. Kalau di tempat lain langsung disajikan data," sesal Imanuel Zebua. Pihaknya mengaku berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. "Dan ini masih berjalan," sebutnya.

Sebelumnya, Kasi Intel Syahrir Sagir mendaftari Puspem Badung. Sejumlah pejabat di sana dimintai keterangan sesaat sebelum berangkat ke Pura Besakih. Syahrir Sagir membenarkan kedatangannya ke Badung guna meminta keterangan serta mencari data. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 18 April 2015

Hal : 2



Kasus Korupsi di Dishutbun

Ajus Dihukum 2,5 Tahun,

Jaksa Banding

Amlapura (Bali Post) -

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Amlapura, Aditya Okto Tohari, Jumat (17/4) kemarin, menyatakan banding atas vonis ringan terhadap terdakwa Wayan Suradika alias Ajus atas kasus korupsi pengadaan bibit di Dishutbun Karangasem. Memori banding sudah disampaikan kemarin, melalui PN (Pengadilan Negeri) Denpasar.

Soal kenapa jaksa menyatakan banding, karena vonis hakim Tipikor PN Denpasar dinilai masih belum memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Jaksa menuntut Ajus dengan empat tahun penjara, denda dan diwajibkan mengembalikan kerugian negara Rp 771 juta. Namun,

majelis hakim memutuskan pidana penjara 2,5 tahun bagi Ajus ditambah denda dan mengembalikan kerugian negara. "Putusan 2,5 tahun penjara belum memberikan rasa keadilan di masyarakat," kata Okto.

Sementara, atas putusan mantan Kasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) I Gede Sandhi, S.Hut., jaksa tak banding. Demikian juga terdakwa Sandhi tidak mengajukan banding dan menerima putusan 1,5 tahun penjara. JPU menuntut pria asal Susuan, Amlapura itu dengan hukuman dua tahun penjara. "Putusan untuk terdakwa Sandhi, kami nilai sudah menunjukkan rasa keadilan di masyarakat. Di mana putusan majelis hakim sudah

lebih dari 2/3 dari tuntutan JPU," katanya.

Menurut Okto yang membeberatkan bagi Ajus, dia sama sekali tak ada niat mengembalikan kerugian negara. Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Ajus sendiri yang menggunakan uang negara itu. Soal ada uang Rp 11,4 juta yang disita dan dirampas untuk negara, uang barang bukti itu semata hasil pengeledahan dari penyidik Kejari Amlapura yang menangani kasus itu. Sementara, Sandhi mengaku tak ikut menikmati uang dari kerugian negara Rp 771 juta. Namun, sebagai pejabat Sandhi dinilai telah menguntungkan orang lain yakni terdakwa Ajus yang mengakibatkan kerugian negara.

Okto mengatakan, dia sendiri tak percaya kalau Ajus yang menikmati uang Rp 771 juta dari korupsi pengadaan bibit itu. "Namun nantinya kalau terungkap ada bukti baru, tentunya kasus itu bisa dilanjutkan lagi dengan tersangka lainnya. Kami sambil jalan, kalau ada bukti baru lagi, kita akan proses. Soalnya, dalam tindak pidana, kedaluwarsanya sangat lama," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada proyek pengadaan bibit kayu hutan di Dishutbun Karangasem pada pos hibah uang. Hibah uang tahun 2013 itu nilainya Rp 1,2 miliar aspirasi dari empat anggota DPRD Karangasem periode 2009-2014. Keempat mantan anggota DPRD

Karangasem sempat diperiksa baik di penyidik, maupun memberikan keterangan di sidang Tipikor itu.

Menurut Okto yang juga Kasi Pidsus Kejari Amlapura itu, modus korupsi itu di mana terdakwa Ajus sebagai pendamping kelompok tani yang menerima bibit itu di antaranya kelompok tani dari Seraya dan ada dari kecamatan Kubu. Uang pengadaan bibit dicairkan di BPD, tetapi saat pencairan di bank sudah ada terdakwa Ajus yang menunggu potongan dari ketua kelompok tani penerima bibit. Kelompok tani hanya menerima sedikit uang itu. Sementara bibit sudah disediakan Ajus dan bahkan pembibitan sudah dilakukan jauh sebelumnya. (013)



Menimbang Reklamasi

Bisa Timbulkan Ketimpangan Ekosistem



I Made Andi Arsana, Ph.D.

REKLAMASI Teluk Benoa menjadi isu yang menyita perhatian banyak orang di Bali, bahkan di tingkat nasional saat ini. Para aktivis bergerak, ilmuwan beropini dan pro-kontra pun terjadi. Mereka yang pro-reklamasi sering menceritakan keindahan dan manfaat reklamasi untuk masa depan Bali dengan ker-

ap mencontohkan Jumeirah Palm Island di Uni Emirat Arab.

Bayangkanlah diri Anda berjemur di Jumeirah Palm Island menikmati segelas minuman dingin khas tropis sambil membaca buku atau sekadar bermalas-malasan. Bayangkan pula, dua dekade lalu, pulau itu tidak ada dan yang ada

ketika itu adalah laut. Berterima kasihlah karena ada reklamasi yang kemudian membuat pulau itu ada.

Apakah reklamasi selalu seindah yang kita bayangkan tentang Jumeirah Palm Island? Mari kita lihat.

Tulisan ini tidak secara khusus membahas reklamasi Teluk Benoa, Bali, tetapi melihat reklamasi dari perspektif yang lebih umum.

Pada kawasan yang rawan bencana seperti Indonesia, reklamasi memiliki ancaman tersendiri. Reklamasi yang merupakan intervensi manusia sangat mungkin memiliki kekuatan dan daya

tahan yang lebih rendah dibandingkan lingkungan alami. Jika kawasan reklamasi ini mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan gelombang pasang, erosi, dll maka kerusakannya bisa lebih parah dibandingkan kawasan alami.

Hal. 27

Organisme Asing



Sambungan ...

Dampak Reklamasi

Jika kawasan reklamasi ini mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan gelombang pasang, erosi, dll. maka kerusakannya bisa lebih parah dibandingkan kawasan alami.

Hadirnya material baru dari berbagai tempat untuk reklamasi bisa membawa organisme asing yang belum tentu cocok bagi kawasan reklamasi tersebut.

Pada akhirnya, reklamasi yang demikian bisa menimbulkan ketimpangan ekosistem yang pada jangka panjang bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Reklamasi juga dapat mengganggu pertumbuhan, reproduksi serta distribusi fitoplankton yang akhirnya menyebabkan gangguan pada zooplankton yang hidupnya bergantung pada fitoplankton.

Perubahan bentuk garis pantai akibat reklamasi bisa mengubah pola aliran arus laut di kawasan tersebut. Dengan perubahan arus laut ini maka sangat mungkin terjadi kerusakan. Misalnya, ada bagian pesisir yang semula tidak mendapat terjangan arus laut yang kuat kini mendapat terjangan yang lebih kuat akibat perubahan arus laut ini. Dengan kata lain, reklamasi di satu kawasan bisa merusak kawasan pesisir lain.

Reklamasi yang bersifat masif sehingga menghadirkan ruang baru bagi aktivitas manusia bisa mengundang pendatang dari berbagai kultur yang berbeda.

Beban sosial yang meningkat di kawasan reklamasi secara langsung akan menjadi beban tambahan bagi lingkungan yang lebih luas karena kawasan reklamasi tidak berdiri sendiri.

Reklamasi bisa menciptakan ruang sosial dan geografis baru yang "terpisah" dari lingkungan lainnya, terlebih jika kawasan reklamasi ini diperuntukkan bagi kaum berpunya. Reklamasi bisa menciptakan "dunia baru" yang terpisah dengan "dunia nyata" di sekitarnya sehingga jurang perbedaan bisa kian menganga.



Sambungan ..

Organisme Asing ✓

Dari Hal. 1

Hal ini juga dikemukakan oleh Arun Kumar dalam tulisannya yang berjudul "Reclaimed Islands and New Off-shore Townships in the Arabian Gulf: Potential Natural Hazards di Current Science" pada Februari 2009.

Hadirnya material baru dari berbagai tempat untuk reklamasi bisa membawa organisme asing yang belum tentu cocok bagi kawasan reklamasi tersebut. Pada akhirnya, reklamasi yang demikian bisa menimbulkan ketimpangan ekosistem yang pada jangka panjang bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Xuan Wang dkk. mengungkapkan bahwa usulan reklamasi di Tong'an Bay, Xiamen, Cina bisa menelan biaya kerusakan ekosistem yang jauh lebih besar dibandingkan potensi kerugian internal proyek reklamasi itu sendiri. Penelitian ini dipublikasikan dengan judul "Estimating the ecosystem service losses from proposed land reclamation projects: A case study in Xiamen di Jurnal Ecological Economics" Volume 69 tahun 2010.

Reklamasi juga dapat mengganggu pertumbuhan, reproduksi serta distribusi fitoplankton yang akhirnya menyebabkan gangguan pada zooplankton yang hidupnya bergantung pada fitoplankton. Selain itu, pengerukan dasar laut bisa secara langsung memengaruhi kondisi bentos sehingga jumlahnya berkurang atau bahkan punah. Singkatnya, proyek reklamasi bisa berdampak sangat buruk bagi lingkungan pesisir dan laut, ditandai dengan kerusakan

biodiversitas. Hal ini ditegaskan, misalnya, oleh Kunyu Li dkk. dalam tulisannya "Effects of Reclamation Projects on Marine Ecological Environment in Tianjin Harbor Industrial Zone di Procedia Environmental Sciences", Volume 2, tahun 2010.

Perubahan bentuk garis pantai akibat reklamasi bisa mengubah pola aliran arus laut di kawasan tersebut. Dengan perubahan arus laut ini maka sangat mungkin terjadi kerusakan. Misalnya, ada bagian pesisir yang semula tidak mendapat terjangan arus laut yang kuat kini mendapat terjangan yang lebih kuat akibat perubahan arus laut ini. Dengan kata lain, reklamasi di satu kawasan bisa merusak kawasan pesisir lain.

Reklamasi yang bersifat masif sehingga menghadirkan ruang baru bagi aktivitas manusia bisa mengundang pendatang dari berbagai kultur yang berbeda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Aldarmaki tahun 2008 di University of Southampton, pembangunan Jumeirah Palm Island bisa berdampak negatif bagi masyarakat lokal (*indigenous people*) yang merupakan minoritas karena hanya 12% dari populasi total. Intinya, reklamasi yang ditujukan untuk memanjakan kaum pendatang yang bermodal besar bisa menyisihkan masyarakat lokal dengan aktivitas tradisi dan ritual mereka.

Beban sosial yang meningkat di kawasan reklamasi secara langsung akan menjadi beban tambahan bagi lingkungan yang lebih luas karena kawasan reklamasi tidak berdiri sendiri. Kawasan reklamasi memiliki ketergantungan yang besar dalam hal pasokan nutrisi, energi

dan sebagainya. Hal ini ditulis dengan baik oleh Pernilla Ouis dalam sebuah tulisan "And an Island Never Cries: Cultural and Societal Perspectives on the Mega Development of Islands in the United Arab Emirates" dan diterbitkan oleh Springer tahun 2011.

Dalam konteks lain, reklamasi bisa menciptakan ruang sosial dan geografis baru yang "terpisah" dari lingkungan lainnya, terlebih jika kawasan reklamasi ini diperuntukkan bagi kaum berpunya. Reklamasi bisa menciptakan "dunia baru" yang terpisah dengan "dunia nyata" di sekitarnya, sehingga jurang perbedaan bisa kian menganga. Disparitas ekonomi dan gaya hidup bisa makin menegas dan bisa muncul kecemburuan di antara kelas-kelas masyarakat yang kian lebar perbedaannya. Dalam tulisannya yang berjudul "Man-made islands as anxious spaces, cultural icons, and travelling visions" di jurnal *Environment and Planning* tahun 2009, volume 41, Mark Jackson dan Veronica della Dora mengingatkan kita akan potensi ini.

Tulisan ini bisa bertambah panjang karena memang sangat banyak dampak reklamasi yang perlu mendapat perhatian serius. Intinya, perlu disadari bahwa reklamasi tidak selalu menghadirkan ruang baru dengan suasana dramatis seperti yang kita bayangkan atau lihat dari iklan-iklan pariwisata. Di balik itu telah mengintip berbagai bahaya yang jika tidak diantisipasi bisa menjadi serangan balik yang dahsyat dan menghancurkan.

Penulis, Dosen Teknik Geodesi UGM, Peneliti aspek geospasial dan legal isu kelautan.



Bali Post/kmb34

PERBAIKAN - Tampak ruas jalan di sepanjang Jalan Udayana Kota Singaraja mendapat perbaikan menggunakan alat berat, Jumat (17/4) kemarin.

Rp 5 M, Alokasi Pembenahan Jalan Kartini dan Udayana

Singaraja (Bali Post) -

Infrastruktur jalan di kota mendapat atensi pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pekerjaan Umum. Pembenahan menasar sejumlah jalan di bilangan Jalan Kartini dan Jalan Udayana Kota Singaraja. Beberapa bulan sebelumnya, Jalan Udayana dan Kartini mendapat keluhan masyarakat, akibat bergelombang dan rusak. Kondisinya semakin memprihatinkan, mengingat ruas jalan dipergunakan masyarakat dan mahasiswa-mahasiswi menuju areal Kampus Undiksha Singaraja, dan Lapangan Bhuna Patra Singaraja. Bupati Buleleng, Agus Suradnyana, kemudian segera memberikan mandat perbaikan kepada Kadis PU.

"Saya berharap konstruksi jalan yang diperbaiki ini bertahan dalam durasi waktu lama. Strategi saya, mengapa jalan

dihotmix di semua pedesaan dibenahi. Peralnya, dengan jalan dihotmix, estimasi waktunya berumur tujuh tahun. Nah kalau dalam tiga sampai empat tahun bisa memperbaiki secara keseluruhan, artinya saya tidak perlu setiap tahun, hanya perlu tiga tahun anggaran memperbaiki semuanya," ucap Bupati Suradnyana, Jumat (17/4) kemarin.

Struktur ruas jalan sebelumnya mengalami kerusakan aspal mengelupas dan bergelombang. Rusaknya jalan-jalan itu akibat arus jalan padat dan setiap hari dilewati truk-truk bertonase berat. Dialokasikan anggaran Rp 5 miliar untuk perbaikan jalan itu. Panjang jalan mencapai 1,2 kilometer, diestimasi rampung dalam 150 hari kerja. Di mana proyek pelaksana dilakukan PT Aditya Sinar Pratama dengan kosultan pengawas CV Ayu Desain: (kmb34)

Edisi : Sabtu, 18 April 2015

Hal : 10



Sempat Mangkrak

Pembangunan PPI Karangdadi
Kembali Digarap 2016



Bali Post/kmb31

TERKUBUR - Nasib proyek Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Kusamba, Dawan, Klungkung, kian merana. Setelah Hasil kaji ulang tahun lalu memperlihatkan proyek ini layak dilanjutkan, namun hingga bulan ke empat tahun ini, belum ada tanda-tanda pembangunan PPI Kusamba dilanjutkan lagi. Kondisi bangunan utamanya makin tenggelam oleh pasir pantai. Demikian juga breakwater, berantakan diterjang gelombang pasang.

PANGKALAN Pendaratan Ikan (PPI) di Dusun Karangdadi, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan direncanakan dilanjutkan pengerjaannya tahun 2016. Pengerjaannya sekaligus mengubah status PPI menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (P3). Pelabuhan ini nanti diproyeksikan bisa mendorong program poros maritim pemerintah pusat untuk membangun sektor perikanan secara masif di setiap daerah.

Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (PPK) Klungkung Gusti Ngurah Badiwangsa, Kamis (16/4) mengatakan, sejak lokasi saat ini sesuai dengan kajian konsultan masih dinyatakan layak, pihaknya sudah menindaklanjuti hasil itu dengan kembali melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Bahkan, pihaknya bersama Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, juga sudah melakukan

presentasi di Kementerian Perikanan dan Kelautan RI. "Dari presentasi kami, pemerintah pusat sudah berkomitmen, bahwa pelabuhan ini akan diselesaikan. Nantinya akan menjadi pelabuhan perikanan

pantai," katanya.

Untuk menyelesaikan pembangunannya anggaran sekitar Rp 100 miliar. "Pemerintah pusat sudah menegaskan akan dianggarkan tahun 2016. Den-

gan mengubah status PPI menjadi P3, maka anggaran dari pemerintah pusat nantinya yang turun ke daerah juga lebih besar, dibandingkan anggaran yang bersumber dari DAK,"

ujarnya.

Tersendatnya pembangunan pelabuhan tersebut karena persoalan pendanaan. Anggaran yang dikucurkan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) setiap

tahunnya, dirasakan sangat kecil untuk menyelesaikan pelabuhan tersebut.

Padahal, membangun sebuah pelabuhan membutuhkan anggaran cukup besar, dengan tahapan pembangunan secara berkelanjutan, bukan setengah-setengah, seperti yang terjadi sejak tahun 2004 sampai tahun 2012.

Ia menyebut, rata-rata PPI di seluruh Indonesia yang didanai dari DAK nasibnya serupa dengan PPI Karangdadi saat ini. Pernyataan ini sekaligus menepis keraguan masyarakat, bahwa proyek ini bakal dihentikan pemerintah pusat. Selama ini, pemerintah pusat menilai pelabuhan itu sudah menghabiskan anggaran cukup banyak.

Sejak dibangun dari tahun 2004 sampai tahun 2012, total PPI itu sudah menghabiskan anggaran Rp 21.959.650.000. Tahun 2013 sempat dianggarkan sebesar Rp 2.271.520.000, untuk pembangunan breakwater sisi barat sepanjang 25 meter. Namun, tidak jadi digunakan karena dilakukan review design. (kmb31)



Soal Reklamasi Teluk Benoa

KLH Pahami Trauma Masyarakat Bali

Jakarta (Bali Post) -

Nasib rencana reklamasi Teluk Benoa saat ini sedang berada di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH). Proses analisis dampak lingkungan (amdal) rencana reklamasi Teluk Benoa masih dalam kajian KLH.

Izin amdal inilah yang akan menjadi penentu berlanjut atau tidaknya kegiatan reklamasi di Teluk Benoa. Sebab, dari izin amdal tersebut investor baru bisa memegang izin pelaksanaan sebagai syarat bisa mereklamasi. Namun, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPD-RI bersama pihak-pihak terkait, KLH menekankan investor harus mampu meyakinkan trauma yang ada di masyarakat Bali bahwa reklamasi tidak selalu berdampak buruk.

"Kami memahami ada trauma pada reklamasi Pulau Serangan. Terkait dengan hal itu, kami menekankan pada pemrakarsa agar meyakinkan masyarakat bahwa revitalisasi ini

tidak seperti yang terjadi di Pulau Serangan. Pemahaman masyarakat harus menjadi nomor satu. Pemrakarsa harus betul-betul memberikan pemahaman memadai kepada masyarakat," kata Deputy Tata Lingkungan KLH Imam Hendargo Abu Ismoyo dalam forum RDP yang digelar Komite II DPD, Rabu (15/4).

Dalam catatan *Bali Post*, mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar dan Gusti Muhammad Hatta pernah mengkampanyekan rehabilitasi Pulau Serangan dengan kegiatan penanaman pohon bakau, penghijauan hutan mangrove, pengembangbiakan terumbu karang, dan upaya lain dalam rangka mengembalikan dan memperbaiki kerusakan Pulau Serangan akibat reklamasi.

Proses reklamasi berlangsung selama dua tahun. Luas Serangan kemudian bertambah hampir empat kali lipat menjadi 481 hektar.

Hal. 27

Kerusakan Ekosistem

Kerusakan Ekosistem

Dari Hal. 1

Namun, akibat dari reklamasi selain terjadi kerusakan ekosistem, banyak nelayan kehilangan mata pencarian.

Oleh karena itu, Imam menegaskan konsultasi publik menjadi sangat penting agar semua masyarakat di Bali memahami benar baik-buruknya kegiatan reklamasi di Teluk Benoa. "Karena itu, semua kepentingan di masyarakat harus diakomodasi. Kalau pemrakarsa tidak mengakomodasi, patut dipertanyakan. Oleh karena itu, konsultasi publik menjadi sangat penting. Adanya pro-kontra di masyarakatlah yang membuat rencana revitalisasi ini menjadi sangat penting," imbuhnya.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (DKP3K KKP) Sudirman Saad mengatakan kementeriannya berupaya melaksanakan *good government* dalam menyikapi persoalan ini. Yaitu, berupaya mendasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku. "Sebab, bila pemerintah melanggar akan ada konsekuensinya, bisa dianggap berkhi-

anat," katanya.

Sejauh ini, menurut Sudirman, investor telah memperoleh izin lokasi dari kementeriannya. Izin tersebut diklaim telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. "Kami dari pemerintah sangat tergantung pada peraturan perundangan," tegasnya.

Soal kewenangan pemberian izin ini, Sudirman mengatakan ketentuan perundangan juga telah menyatakan ada tiga pihak yang diberi kewenangan menerbitkan izin yaitu di tingkat pusat Menteri KKP dan Menteri Perhubungan. "Untuk izin Menteri Perhubungan di daerah yang terkait dengan pelabuhan, di luar itu menjadi kewenangannya KKP. Ada juga kewenangan gubernur dan bupati/wali kota," katanya.

Sesuai PP No.26 Tahun 2008 tentang Kawasan Strategis Nasional, menurut Sudirman, Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) masuk dalam kategori daerah KSN. "Atas dasar PP tersebut, maka perizinan yang diberikan beralih dari pemerintahan provinsi menjadi kewenangan KKP," jelasnya. (kmb4)

Edisi : Sabtu, 18 April 2015

Hal : 1 dan 27



Anggaran Belum Cair,

Tahapan Pilkada Jembrana Terancam Molor

NEGARA, NusaBali

Proses tahapan rangkaian pelaksanaan Pilkada yang rencananya dimulai Minggu (19/4) besok, berdasar draf Peraturan KPU (PKPU), terancam molor. Pasalnya, hingga Jumat (17/4), anggaran untuk pelaksanaan melalui KPU itu, belum dapat dicairkan, akibat belum turunnya PKPU yang menjadi dasar acuan pasti pelaksanaan.

Begitu juga dengan agenda tahapan pelaksanaan di KPU Jembrana. Menurut Ketua KPU Jembrana, I Gusti Ngurah Darma Sanjaya, saat ditemui di Kantor KPU Jembrana, Jumat siang kemarin, sesuai dengan acuan draft PKPU yang sementara dijadikan pegangan pelaksanaan, tahapan awal sebenarnya sudah dimulai Minggu besok. Dimana tahapan awal tersebut, adalah pembentukan adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tahapan tersebut, dikatakan, seharusnya dana sudah bisa



SEKRETARIS KPU Jembrana, Gede Martiana, bersama seorang staf Sekretariat KPU Jembrana, yang tampak sibuk mempersiapkan proses untuk pencairan dana Pilkada, Jumat (17/4).

dicairkan Jumat kemarin. Sesuai dengan kesepakatan antara KPU dengan Pemkab Jembrana, KPU diberikan dana sebesar Rp 11,4 miliar untuk pelaksanaannya. Namun dana tersebut, diberikan diawal sebesar Rp 10,3 miliar sesuai dengan penganggaran di APBD In-duk 2015, sedangkan sisanya di APBD Perubahan 2015.

“Masalah kesepakatan dana memang dari Pemkab sudah komitmen, dan memastikan sudah siap. Tapi implementasi ini, berusaha kita kejar, biar bisa hari ini. Itu ada diminta kita harus menyiapkan RAB, nomor rekening, NPWP, dan kita sekarang sedang kita siapkan semua hari ini (kemarin), sehingga mudah-mudahan hari ini juga bisa

• NUSABALI.BI.DIWANGKARA



Sambungan...

cair," ujarnya.

Dari perhitungan, dana sudah harus turun Jumat kemarin, karena pada Sabtu (18/4) hari ini dan Minggu besok adalah hari libur. Pihaknya sendiri mengaku, memang ada sedikit permasalahan yang cukup memakan waktu, dari segi RAB. Dimana harus disediakan RAB khusus untuk pencairan awal sebesar Rp 10,3 miliar dan sisa untuk yang di Perubahan, karena memang tidak dipersiapkan terpisah sebelumnya.

Di sisi lain, Setda Jembrana selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jembrana, I Gede Gunadnya, didampingi Kakan Kesbangpol Jembrana, Gusti Ngurah Darma Putra, dikonfirmasi terpisah Jumat sore kemarin, mengatakan, pada intinya, pihaknya sudah sangat siap terkait masalah dana untuk pelaksanaan Pilkada tersebut. Namun untuk dana yang diharapkan dapat dicairkan kemarin oleh KPU, diungkapkannya, pesimis dapat terealisasi. Satu sisi dari KPU juga baru menyiapkan beberapa hal

mengenai syarat pencairannya, dan kendala utama juga ada pada PKPU yang belum turun. "Pada intinya, kalau masalah anggaran kita sudah siap dan sudah terangkan. Tapi masalahnya, dasar PKPU sekarang belum turun, dan kalau tidak ada dasar itu sebagai acuannya, kita tidak bisa," ujarnya.

Dari koordinasi pihak Kesbangpol Jembrana, dikatakan, jika di kabupaten lain di Bali yang juga ikut melaksanakan Pilkada serentak, masih menemukan kendala sama. Bahkan di Bangli, diklaim, belum ada kesepakatan masalah anggaran. Sedangkan pihaknya sudah sangat siap masalah anggaran, meskipun khusus di Jembrana, sempat terjadi dinamika mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada. Dimana, sesuai dengan Perpu yang sempat dikeluarkan, pelaksanaan Pilkada Jembrana sempat diagendakan diundur di tahun 2018. Namun nyatanya, Pilkada Jembrana tetap terlaksana di tahun 2015 ini, dan anggarannya juga telah disiapkan di tahun ini. **od**